



## Peran Komunikasi dan Koordinasi dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo

Nisau Imammatul Jannah<sup>1</sup>, Wafi Abidah Ardellia<sup>2</sup>,

Diana Pramudya Wardhani<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Ponorogo <sup>1,2,3</sup>

e-mail: nisau050428@gmail.com

### Abstract

*Effective communication and coordination are essential prerequisites for achieving transparent and accountable regional financial management. This study aims to analyze the role of communication and coordination in supporting financial management at the Secretariat of the Regional House of Representatives DPRD of Ponorogo Regency as well as to identify the constraints encountered in its implementation. The research employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques including internship activities observation interviews and a review of financial administrative documents. The results indicate that effective communication and coordination both internally among divisions and externally with the leadership and members of the DPRD play a significant role in supporting the smooth execution of financial planning implementation administration and accountability processes. However this study also identified several challenges including differences in the understanding of regulations limited human resources and a high administrative workload*

**Keywords:** Organizational Communication Regional Financial Management Local Government Governance.

### Abstrak

Komunikasi dan koordinasi yang efektif merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan magang, observasi, wawancara, dan telaah dokumen administrasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang berjalan baik, baik secara internal antarbagian maupun secara eksternal dengan pimpinan dan anggota DPRD, berperan penting dalam mendukung kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pada penelitian ini masih ditemukan kendala berupa perbedaan pemahaman regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingginya beban kerja administrasi.

**Kata Kunci:** Komunikasi Organisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, yang secara teoritis mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai prinsip good governance (Sarjayadi et al., 2024).

DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang pelaksanaannya didukung oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis, termasuk dalam pengelolaan keuangan (Habibah & Eprilianto, 2024).

Dalam praktik pengelolaan keuangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo masih dihadapkan pada kompleksitas administrasi serta tuntutan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin tinggi. Pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kondisi tersebut menuntut adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antarbagian agar setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat berjalan secara selaras dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018).

Komunikasi organisasi yang tidak berjalan dengan baik berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap regulasi, keterlambatan penyampaian informasi, serta kesalahan administrasi keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins dan Judge (2017) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam mendukung koordinasi kerja dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD, koordinasi yang lemah antarunit kerja dapat berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan program kerja dengan pengelolaan anggaran yang tersedia.

Koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan pimpinan serta anggota DPRD juga menjadi faktor penting dalam mendukung fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui komunikasi yang terbuka dan terstruktur, informasi keuangan dapat disampaikan secara akurat sehingga mendukung pelaksanaan fungsi legislatif DPRD secara optimal (Halim & Kusufi, 2019). Wulandari dan Aisyah (2023) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam membangun koordinasi internal dan eksternal yang berkesinambungan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan administrasi, ketidaktepatan pelaksanaan anggaran, serta risiko penyimpangan

keuangan (Dedy Afrianto et al., 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek perencanaan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah secara umum, sementara kajian yang secara spesifik mengulas peran komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, khususnya di Kabupaten Ponorogo, masih terbatas sehingga menimbulkan research gap. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap komunikasi dan koordinasi sebagai faktor proses organisasi yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi dan koordinasi berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam mengenai peran komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami proses, pola interaksi, serta dinamika hubungan kerja yang terjadi dalam pengelolaan keuangan, baik secara internal di lingkungan Sekretariat DPRD maupun secara eksternal dengan pimpinan dan anggota DPRD serta perangkat daerah terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan koordinasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang terjadi, dengan fokus pada praktik komunikasi dan koordinasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana komunikasi dan koordinasi berkontribusi terhadap terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan magang, wawancara dengan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, penelitian ini berfokus pada peran komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat

penting dalam menjamin kelancaran proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan. Meskipun secara umum telah berjalan cukup baik, masih ditemukan beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

### **Peran Komunikasi Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa komunikasi internal antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo telah berjalan cukup baik dan menjadi faktor pendukung utama dalam pengelolaan keuangan. Komunikasi dilakukan secara formal melalui rapat koordinasi, disposisi pimpinan, serta penyampaian surat dan dokumen keuangan, maupun secara informal melalui diskusi langsung antarpegawai. Komunikasi yang terjalin dengan baik memudahkan penyampaian informasi terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pertanggungjawaban keuangan.

Hal ini membantu mengurangi kesalahan administrasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Ardiansyah, 2019) yang menyatakan bahwa komunikasi internal yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan. Selain itu, (Sukarno, 2021) juga menjelaskan bahwa komunikasi yang terstruktur melalui koordinasi rutin dan disposisi pimpinan berperan penting dalam memperlancar alur kerja serta menjaga ketertiban administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Selain komunikasi internal, komunikasi eksternal antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD juga berperan penting. Melalui komunikasi yang intensif, kebutuhan kegiatan DPRD dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

### **Peran Koordinasi Antarbagian dalam Pengelolaan Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarbagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo menjadi kunci dalam menjaga kelancaran setiap tahapan pengelolaan keuangan. Koordinasi dilakukan antara bagian perencanaan, keuangan, persidangan, dan bagian lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD. Koordinasi yang baik memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, sehingga setiap bagian dapat menjalankan perannya secara optimal. Dalam praktiknya, koordinasi membantu menyelaraskan jadwal kegiatan DPRD dengan ketersediaan anggaran dan prosedur administrasi yang berlaku. Temuan ini mendukung pendapat (Warsono, Hanani, & Rahman, 2023) yang menegaskan bahwa koordinasi yang efektif antarunit kerja dapat mencegah keterlambatan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Koordinasi yang

dilakukan masih memerlukan penguatan, terutama dalam situasi tertentu yang membutuhkan respon cepat. Beberapa kendala koordinasi muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap regulasi keuangan serta padatnya agenda kegiatan DPRD.

### **Tantangan dalam Komunikasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan**

Meskipun komunikasi dan koordinasi telah dilaksanakan, penelitian ini menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman pegawai terhadap regulasi keuangan yang sering mengalami perubahan. Kondisi ini menyebabkan perlunya penjelasan berulang dan koordinasi yang lebih intensif agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang cukup tinggi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang optimal. (Azahra Ashilah et al., 2025) menyatakan bahwa keterbatasan SDM dan kurangnya pelatihan teknis dapat menghambat efektivitas koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga terlihat di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, di mana tidak semua pegawai memiliki latar belakang atau pemahaman yang sama terkait pengelolaan keuangan berbasis regulasi terbaru

### **Dampak Komunikasi dan Koordinasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Informasi keuangan dapat disampaikan secara jelas, laporan keuangan disusun lebih tertib, serta proses pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi juga memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator dan penghubung antara DPRD dan perangkat daerah lainnya. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sebagaimana ditegaskan oleh (Sarjayadi, et al 2024) bahwa pengelolaan keuangan yang terkoordinasi dengan baik merupakan salah satu indikator utama good governance di tingkat daerah

### **Upaya Peningkatan Efektivitas Komunikasi dan Koordinasi**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi, antara lain dengan memperkuat forum rapat koordinasi, memperjelas alur komunikasi antar bagian, serta meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi keuangan melalui pendampingan dan pembinaan internal. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan kendala

komunikasi dan koordinasi yang selama ini dihadapi, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang efektif, baik secara internal antarbagian maupun secara eksternal dengan pimpinan dan anggota DPRD, mampu mendukung kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Koordinasi antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo juga berkontribusi signifikan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan serta memastikan setiap kegiatan DPRD dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui koordinasi yang baik, pembagian tugas menjadi lebih jelas dan risiko terjadinya keterlambatan maupun kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, seperti perbedaan pemahaman terhadap regulasi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang keuangan, serta tingginya beban kerja administrasi. Tantangan tersebut berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan keuangan apabila tidak dikelola dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azahra Ashilah, Adhe Fadli Farhan, & Kustiawan Kustiawan. (2025). Implementation of the Main Duties and Functions of Financial Management in the General and Financial Section of the Tanjungpinang City DPRD Secretariat. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 29–44.  
<https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.416>
- Dedy Afrianto, sunardi, nanik sisharini. (2024). Pengaruh Perencanaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 1115.
- Habibah, Umi Nur, & Eprilianto, Deby Febrian. (2024). The Role of the Regional People's Representative Council Secretariat in Minimizing Criminal Acts of Misuse of Regional Government Program/Activity Budgets in Ponorogo Regency. *Publika*, 12(2), 337–348.  
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p337-348>

Halim, A. and Kusufi, M.S. (2019) Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo (2018) Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.

Robbins, S.P. and Judge, T.A. (2017) Organizational behavior. 17th edn. New York: Pearson Education.

Sarjayadi, Aldri Frinaldi, Nora Eka Putri, Asnil. (2024). Optimizing Regional Financial Management in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 2(3), 255–263. Retrieved from <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora>

Sukarno, Bedjo. (2021). The Effectiveness of the DPRD Secretariat's Communication in Implementing DPRD Functions in Boyolali Regency. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 02(07), 115–124. Retrieved from <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/540>

Warsono, Hardi, Hanani, Retna, & Rahman, Amni Zarkasyi. (2023). Local Governments' Financial Accountability Responses in Critical Time: Reflection from Intergovernmental Management in Indonesia During the Early Covid-19 Pandemic. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(1), 303–313. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0025>

Wulandari, S. and Aisyah, N. (2023) 'Peran bagian keuangan sekretariat DPRD dalam pengelolaan anggaran daerah', *Jurnal Keuangan dan Administrasi Publik*, 11(1), pp. 33–45. Ardiansyah, Ahmad. (2019). Effect Of Communication and Work Culture on Performance Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 104–117.